

MONITOR BERITA

I

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : /

TAHUN 2006

Tarif Khusus Listrik Beratkan Pengusaha

JAKARTA - Pengenaan tarif khusus listrik kepada pelanggan bisnis, industri dan kantor pemerintah pada jam beban puncak dari pukul 17.00 hingga 22.00 memaksa para pengelola mal segera menaikkan *service charge* (biaya pelayanan) hingga 20 persen pada pertengahan tahun ini.

Direktur PT Primatama Nusa Indah, Very Y Setiady kepada *Pembaruan* di Jakarta, Jumat (6/1) mengatakan, pengenaan tarif khusus ini memang mempengaruhi kenaikan *cover charge*, baik pada pengelola mal itu sendiri maupun kepada para *tenant* (penyewa).

"Untuk pengelola, penge-

naan tarif menyangkut fasilitas umum seperti lampu dan operasional lift, sedangkan kepada para *tenant* biasanya ke pemakaian lampu dan sarana pendukung lainnya," kata Very.

Sebagai pengelola The Plaza Semangi, salah satu pusat perbelanjaan terbesar, Very mengatakan, *service charge* selain ditanggung pengelola, juga akan dikenakan kepada para *tenant*.

Kenaikan yang harus dibayar penyewa ini, tentu akan dikompensasikan dengan menaikkan harga produk-produk dan biaya jasa yang mereka pasarkan.

"Kita sedang menghitung beban tambahan, tetapi biasanya diberlakukan berdasarkan keputusan asosiasi, tetapi saya kira tidak lebih dari 20 persen kenaikannya," kata Very.

Beban Puncak

Kebijakan tarif khusus ini sudah berlaku sejak Oktober tahun 2005 lalu, seiring dengan dikeluarkannya surat edaran No 0016.E/DIR/2005 sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah untuk hemat energi.

Surat edaran itu, menyebutkan pada masa beban puncak PLN menaikkan faktor kali atau koefisien pada rumus perhitungan tarif listrik

dari 1,4 menjadi 2. Selain itu, para pelanggan besar diminta mengurangi pemakaian listrik hingga separuh daya maksimal pada jam-jam beban puncak. Bagi pelanggan besar, jika pada jam beban puncak tidak mengurangi beban hingga separuh, akan dikenakan sanksi dua kali lipat dari tarif di atas.

Untuk *service charge* berdasarkan informasi yang dihimpun *Pembaruan*, masih menerapkan harga yang lama, yang mana perhitungannya dalam dolar Amerika Serikat (AS) dengan kurs yang berbeda-beda. Mal Pondok Indah II misalnya, mematok harga US\$ 10 per meter persegi per bulan dengan kurs Rp 7.500 per dolar AS. Sedangkan, Blok M Plaza, *service charge*-nya US\$ 9 per meter persegi per bulan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Handaka Santosa mengatakan, tarif disinsentif listrik ini memang dikenakan pada para pengelola mal, tetapi ujung-ujungnya beban tersebut akan dilimpahkan pada *tenant*. Apalagi, komponen biaya listrik ini menyangkut 50 persen hingga 60 persen dari total biaya yang harus ditanggung oleh para pengelola mal.

"Pertanyaan saya, apa dasar pertimbangan mengenai disinsentif ini, apakah mereka mau mal tutup pada pukul 18.00 WIB. Kalau itu alasannya, kami tentu melakukan PHK karyawan satu shift yang jumlahnya mencapai 300.000 orang," kata Handaka.

Sebelumnya, dia mengatakan sektor ritel tahun 2006 akan mengalami tekanan cukup berat meski diperkirakan tetap bertumbuh antara 10-15 persen seiring rencana kenaikan gaji pegawai dan karyawan per 1 Januari 2006 serta

pengenaan tarif khusus listrik ini. "Penurunan daya beli masyarakat lebih disebabkan pendapatan mereka dialokasikan lebih banyak untuk biaya transportasi yang naik karena kenaikan harga BBM. Ini berdampak ke pertumbuhan sektor ritel," katanya.

Sementara untuk tahun 2005, dari target pertumbuhan 30 persen realisasinya sekitar 20 persen. Dijelaskan, pedagang ritel kelas menengah ke bawah lebih merasakan dampak penurunan penjualan akibat kenaikan harga BBM.

(B-15)

HUBUNGAN MASYAKAKA I
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

Tinggi, Penunggak Listrik di Depok

DEPOK — Kesadaran warga Depok membayar listrik rupanya masih rendah. Buktinya, area pelayanan jaringan (APJ) Depok setiap bulannya terpaksa memutus jaringan listrik 9.000 hingga 15 ribu pelanggannya karena menunggak pembayaran listrik.

"Pemutusan ini kami lakukan karena mereka menunggak pembayaran rekening listrik sekitar delapan sampai 12 bulan," ujar Manajer APJ Depok, Hadi Suhana, Jumat (6/1).

Menurutnya, sebagian besar penunggak tagihan listrik adalah kelompok pelanggan rumah tangga dan pemutusan aliran listrik tersebut dilakukan tanpa pilih kasih. Jumlah tunggakan tagihan listrik sampai Desember 2005 sebesar Rp 4,8 miliar atau 7,25 persen dari total pendapatan PLN

per tahun, yaitu Rp 675 miliar.

Disebutkan, setiap pelanggan yang diputus aliran listriknya adalah mereka yang menunggak lebih dari tiga hari terhitung dari jatuh tempo pembayaran rekening listrik. Setelah itu, PLN Depok akan memberikan surat peringatan sampai tiga bulan ke depan dan jika pelanggan tersebut belum membayar, maka aliran listrik akan diputus dan boks listrik akan dibongkar. "Peraturannya kan begitu," tegasnya.

Besaran denda yang dikenakan kepada pelanggan yang menunggak sebesar Rp 3.000 setiap bulannya. Sedangkan jika pelanggan ingin memasang kembali listriknya yang sudah diputus dan dibongkar, maka masuk dalam kategori pemasangan listrik baru. "Untuk pemasangan 450 watt bia-

yanya Rp 183 ribu dan untuk 900 watt Rp 363 ribu."

Mengenai pemutusan aliran listrik yang dilakukan PLN Unit Pelayanan Jaringan (UPJ) Sawangan terhadap empat warga korban Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), lanjutnya adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Sebab, keempat pelanggan tersebut menunggak tagihan listrik. "Mereka sudah menunggak selama lebih kurang dua tahun. Kalau soal ganti rugi SUTET saya tidak berkompeten untuk menjelaskan itu," tegasnya.

Sebelumnya, Kamis (5/1) ratusan warga dari lima desa yang menjadi korban SUTET jalur Cilegon-Saguling-Cibinong melakukan aksi unjuk rasa di kantor PLN UPJ Sawangan. ■ c43

2

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : //

TAHUN 2006

Korban SUTET Tetap Harus Membayar Tunggakan

Depok-Empat warga Desa Ciseeng yang sejak 27 September 2005 listriknya diputus PLN Sawangan tetap harus membayar tunggakan listriknya ke PLN. Setelah mereka melunasi tunggakannya, baru pihak PLN memasang kembali listrik ke rumah mereka. Keempat warga Desa Ciseeng yang listriknya diputus oleh PLN adalah Abdul Manan, Saad, Sa'ali dan Nanga.

Pihak PLN Depok menganggap kasus Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) dengan pemutusan listrik yang dialami oleh 4 warga Ciseeng merupakan 2 kasus yang berbeda. "Yang jelas, 4 warga ini merupakan pelanggan kami. Hubungannya ke perdata. Kalau mereka nunggak, kita putus," ujar Manager Area Pelayanan dan Jaringan PLN Depok, Hadi Suhada, di Depok, Jumat (6/1).

Dia juga tidak berani menjelaskan ketika ditanya soal biaya ganti rugi yang diminta para korban SUTET. Menurutnya, itu merupakan kewenangan PLN Pusat. Menurutnya, tiap bulan PLN Depok melakukan pemutusan pelanggan menunggak sebanyak 9.000-15.000 pelanggan. Jumlah pelanggan PLN Depok saat ini sekitar 395.000. Jumlah tunggakan pelanggan pada Desember 2005 sebesar Rp 4,8 milyar atau 7,25 persen dari pendapatan PLN Depok tahun 2005 sebesar Rp 675 miliar.

"Pemutusan ini kami lakukan dengan fair. Untuk itu, kami mohon tidak ada pihak-pihak yang mempolitisasi. Hal ini kami lakukan karena itu tadi, tunggakan di PKN

sangat banyak. Pemutusan ini murni dilakukan untuk menyelamatkan PLN dan tidak ada tendensi apa-apa lanjut Hadi. Dia menjelaskan, sejak tahun 1994, PLN berubah status dari perusahaan umum menjadi perseroan terbatas (PT) sehingga sumber dana andalan PLN berasal dari pembayaran rekening listrik.

Ia mengatakan pemutusan listrik dilakukan apabila pelanggan tidak membayar listrik sampai batas waktu yang ditentukan, misalnya batas bayar listrik setiap tanggal 15, jika pada tanggal tersebut pelanggan belum juga membayar, tanggal 20 listriknya diputus oleh PLN.

Hadi menambahkan, penunggakan pembayaran terjadi karena beberapa faktor, antara lain pelanggan sibuk sehingga tidak punya waktu membayar listrik dan mereka yang sengaja menunggak. Untuk mengatasi masalah tersebut, PLN Depok telah bekerjasama dengan 11 bank sehingga pelanggan bisa membayar rekening listrik lewat auto debet pada bank tersebut.

Terkait masalah pecahnya kaca di kantor PLN Sawangan akibat didorong massa yang demo kemarin, dia mengatakan pihaknya saat ini masih terus meneliti terjadinya kerusakan tersebut dan sudah melaporkannya ke polisi. Hal ini dilakukan sebab kantor PLN Sawangan termasuk objek vital.

Sementara itu, Abdul Manan yang listrik di rumahnya di putus oleh PLN mengatakan dua hari setelah pemutusan tersebut, dia bersama dengan beberapa warga yang listrik di rumah mereka juga diputus menyambung aliran listrik sendiri.

Warga RT 03/RW 02 Desa Ciseeng ini mengaku, sehari setelah pemutusan yang dilakukan oleh PLN dia dan warga lain datang ke Kantor PLN sawangan meminta penjelasan mengenai pemutusan yang dilakukan secara paksa.

(stevani elisabeth)

3

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2006

Warga Demo Kantor PLN Sawangan

■ DEPOK - Sedikitnya 200 warga korban Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) jalur Cilegon-Saguling-Cibinong, Kamis (5/1) pukul 10.00 WIB berunjukrasa di depan kantor PLN Sawangan, Depok.

Mereka meminta PLN menyambung kembali aliran listrik yang selama ini telah diputus. Ketua Presidium Ikatan Keluarga Korban SUTET Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Encep Arif Affandi, mengatakan mereka meminta pertanggungjawaban PLN Sawangan yang telah memutuskan aliran listrik secara sepihak di empat rumah milik warga Desa Ciseeng pada 27 September 2005.

Menurutnya, sejak pembangunan SUTET pada tahun 1995, warga di sekitar SUTET tidak pernah mendapatkan ganti rugi atas tanah mereka yang digunakan sebagai lahan SUTET. Encep menambahkan, ganti rugi yang diminta warga Rp 75.000,- hingga Rp 500.000,- per meter. Ganti rugi ini baru berupa ganti rugi tanah belum termasuk bangunan dan tanaman yang dibabat untuk pembuatan SUTET.

Dia mengakui telah ada pertemuan antara pihak PLN Sawangan dengan warga pada 29 Desember 2004. Disepakati pihak PLN Sawangan tidak akan menagih dan memutus aliran listrik di wilayah korban SUTET sebelum ada penyelesaian ganti rugi dari PLN Pusat.

Warga korban SUTET sendiri berjanji akan melunasi seluruh tunggakan listrik mereka setelah ada proses penyelesaian ganti rugi oleh pihak PLN.

Dalam aksi demo ini sempat terjadi saling dorong antara warga dengan sekitar 30 aparat kepolisian yang berjaga di depan kantor PLN Sawangan yang mengakibatkan pintu kaca di ruang loket pembayaran pecah, namun tidak ada yang ditangkap oleh aparat. Sedangkan dari pihak PLN tidak ada pejabat di kantor itu yang menemui warga. (van)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : ✓

TAHUN 2006

SEKILAS BISNIS

**PLN Akan
Terbitkan
Obligasi**

■ **JAKARTA** - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) berencana menerbitkan obligasi untuk menutupi kebutuhan investasi pengembangan usaha pada 2006. Demikian Direktur Utama PT PLN (Persero) Eddie Widiono di Jakarta, Kamis (5/1).

Namun, katanya, nilainya hingga saat ini belum diputuskan pemegang saham BUMN tersebut, yaitu pemerintah. "Memang ada rencana penerbitan obligasi tahun 2006 ini, tapi kita lihat dulu kondisi pasarnya," katanya. (ant/yan)

5

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 **7** 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2006

Dinas Kebakaran akan Tuntut PLN

JAKARTA — Kepala Dinas Kebakaran DKI Jakarta, Johnny Pangaribuan, mengaku gusar atas jatuhnya korban dari anggotanya, Ahmad Solichin terbaring koma di RS Atmajaya, Pluit, Jakarta Utara, akibat tersengat listrik saat bertugas di lokasi kebakaran, kemarin (6/1).

Johnny berencana menuntut PLN yang dianggap lalai mematikan aliran listrik di lokasi kebakaran. "Akan kita tuntutan. Sebelumnya sudah dua kali. Padahal saya pernah bilang pada kepala PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, ketika ada kebakaran, PLN harus tutup aliran listrik," ujarnya ketika menjenguk Solichin di ruang ICU RS Atmajaya. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk membuat laporan kepolisian.

Kepala Regu (Karu) Sub Dinas Penyelamatan Dinas Kebakaran DKI Jakarta yang bertugas dalam kebakaran itu, Subiyanto, mengatakan timnya diminta untuk membantu pemadaman menjelang pukul 04.00 WIB. Saat kelima mobil pemadamnya tiba, api telah besar. Sekitar pukul 05.30 WIB, lanjutnya, api dinyatakan hampir padam. Pada saat itulah, katanya, anggotanya terkena kabel listrik yang putus. Malangnya kabel itu masih dialiri listrik.

Wali Kota Jakarta Utara, Effendi Anas, mendukung Dinas Kebakaran akan menuntut PLN atas kelalaian pemadaman listrik. "Bagus. Saya dukung," ujarnya. ■ c35

6

HUBUNGAN MASYAKAKA I
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

PLN NTB Siap Beli Jarak Petani

MATARAM (Suara Karya): General Manager PT PLN Nusa Tenggara Barat (NTB) Ir Mustiko Bawono mengatakan, pihaknya siap menampung atau membeli berapa saja produksi jarak petani di daerah ini. Dia menjelaskan, jika ada masyarakat atau petani yang telah menimbun buah jarak, PLN siap membelinya baik dalam jumlah besar maupun kecil.

"Oleh PLN buah jarak tersebut segera akan diolah sebagai campuran minyak solar untuk mesin pembangkit tenaga disel, karena kebutuhan solar dalam setiap tahunnya mencapai sekitar 136 juta liter, dan dari jumlah tersebut 10 persen dicampur minyak jarak," katanya.

Masyarakat diimbau untuk menanam jarak sebanyak-banyaknya baik di areal perkebunan, persawahan maupun pekarangan, bahkan kalau perlu ditanam untuk pagar. Gubernur NTB pada 31 Desember 2005 telah mencanangkan gerakan massal penanaman jarak yang di pusatkan di Puyung, Lombok Tengah, dengan areal seluas 12 hektare. (Ant)

7

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 6

TAHUN 2006

PLN NTB Siap Serap Jarak Petani

MATARAM - PT PLN Cabang Nusa Tenggara Barat (NTB) siap menyerap atau membeli biji jarak produksi petani di daerah ini, berapa pun jumlahnya. Biji jarak ini selanjutnya akan diolah PLN untuk menjadi bahan campuran minyak solar mesin pembangkit tenaga diesel. "Sebab, kebutuhan solar setiap tahunnya mencapai sekitar 136 juta liter, dan dari jumlah ini 10% dicampur minyak jarak," kata *General Manager* PT PLN NTB Mustiko Bawono di Mataram, Jumat (6/1), seperti dikutip *Antara*.

Pemerintah Provinsi NTB pada 31 Desember 2005 mencanangkan penanaman jarak masal yang di pusatkan di Puyung, Lombok Tengah seluas 12 hektare. Menurut Mustiko, dengan gerakan masal menanam jarak itu, diharapkan sepuluh tahun mendatang minyak jarak dapat menjadi bahan bakar alternatif, khususnya solar. NTB menargetkan areal pertanaman jarak seluas 500 hektare, tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Dompu, dan Bima. (wy)

HUBUNGAN MASYAKAKA I
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 7

TAHUN 2006

UJL Milik Pelanggan PLN

Berkenaan dengan surat di *Kompas* (14/12/2005) "Uang Jaminan Pelanggan PLN" yang disampaikan Bapak Miming Rohman perlu dijelaskan, pada dasarnya uang jaminan langganan (UJL) merupakan uang milik pelanggan yang berada di PLN sebagai perkiraan utang yang pada suatu saat uang itu dapat dikembalikan.

Uang UJL dapat dikembalikan apabila pelanggan sudah tidak lagi menjadi pelanggan listrik PLN karena pembongkaran rampung atas permohonan sendiri. Pelanggan melakukan penurunan daya atau perubahan tarif sehingga UJL itu lebih besar dari sebelumnya.

UJL yang ada di PLN dapat dikompensasikan dengan piutang pelanggan yang belum terbayar karena pelanggan dibongkar rampung atas dasar pelanggan menunggak tagihan, rekening dan tunggakan lainnya. Prosedur pengembalian UJL yang harus dipenuhi pelanggan yaitu membuat permohonan pengembalian UJL. Melampirkan kuitansi asli pembayaran UJL bila tidak ada dapat dilampirkan surat keterangan kehilangan dari pihak yang berwajib. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) dan nomor rekening bank pelanggan bila ada.

R KRISNA SIMBAPUTRA
Manajer PT PLN (Persero)
Dist Jabar & Banten Area Pelayanan & Jaringan Cimahi

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE : <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
(JAN) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 7		TAHUN 2006

Pesimisme Sektor Kelistrikan 2006

Oleh
ALI UTSMAN

Tahun Baru lazimnya disambut dengan semangat optimisme dan harapan akan perbaikan serta pembaruan. Namun, bagi sektor kelistrikan, tahun 2006, apa boleh buat, masih dibayangi kegelapan. Mampukah sektor kelistrikan mengimbangi tuntutan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen?

Jawabannya tidak gampang sebab ada masalah klasik, yakni biaya produksi yang tidak tertutupi oleh tarif listrik yang belum ekonomis dan sektor kelistrikan harus menanggung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang mendekati harga pasar.

Padahal, bila dilihat dari data antara permintaan daya dan pasokan belum sebanding. Konsumsi listrik masyarakat Indonesia per kapita mencapai 0,5 megawatt jam (MWh), sedangkan kapasitas terpasang hanya sekitar 0,1 kilowatt (KW). Belum lagi bicara soal pertumbuhan konsumsi listrik yang setiap tahunnya mencapai 6-7 persen atau sekitar 1.000-1.250 megawatt (MW). Dengan demikian, terbuka peluang untuk berinvestasi di sektor kelistrikan.

Sekarang, mari bicara faktanya. Apakah sektor kelistrikan cukup kondusif bagi investor? Dibandingkan dengan empat tahun lalu, sektor kelistrikan saat ini sudah bangun dari mati suri. Salah satu indikasinya adalah dilanjutkannya pembangunan proyek-proyek besar pembangkit pada tahun 2006 di Pulau Jawa. Ketiga proyek itu adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap (1 x 300 MW), PLTU Tanjung Jati B (2 x 600 MW), dan PLTU Cilegon (750 MW).

Ketiga proyek ini memiliki nilai strategis. Pertama, mengurangi ketergantungan pasokan listrik dari PLTU Surabaya dan PLTU Paton. Pembangkit baru tak lagi memakai bahan bakar minyak. Ketergantungan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap BBM jenis *high speed diesel* (HSD) dan *marine fuel oil* (MFO) merupakan pelajaran pahit akan tingginya biaya pembangkitan ketika harga minyak naik terus.

Untuk lebih merangsang masuknya investor, pemerintah harus segera memperbaiki harga jual listrik. Saat ini biaya pokok produksi listrik sekitar Rp 1.300 per kWh, sedangkan tarif dasar listrik (TDL) hanya sekitar Rp 588 per kWh. Dengan demikian, PLN harus menutupi selisih tingginya biaya produksi.

Hal ini mendorong PLN melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban kerugian biaya produksi. Salah satu cara yang ditempuh mengembalikan beban tersebut kepada konsumen listrik dalam bentuk penerapan tarif yang lebih tinggi untuk kondisi pemakaian listrik dan golongan pemakai tertentu.

Dilematis
Namun, menurut pengamat kelistrikan Nengah Sudja, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit (dilematis). Menurut Nengah, kalau mau langsung dinaikkan mengikuti kenaikan harga minyak bisa berdampak memicu tingginya angka inflasi.

Padahal, menurut Direktur Utama PLN Eddie Widiono, saat ini tidak mungkin bagi PLN membangun proyek infrastruktur dengan dana sendiri. Pendapatan yang diperoleh PLN seluruhnya dihabiskan untuk biaya operasional perusahaan. Oleh sebab itu, PLN sangat tergantung pada

dari pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur kelistrikan.

Di sisi lain, rencana PLN dan anak perusahaannya menerbitkan saham untuk dana investasi kelistrikan pada tahun 2006 masih belum jelas. Padahal, jika semua bisa berjalan sesuai target, yakni memperbanyak pembangunan pembangkit berbahan bakar batu bara maupun konversi pembangkit berbahan bakar gas yang masih memakai solar, jelas akan membuat sektor kelistrikan lebih efisien.

Dengan catatan, target itu harus dibarengi dengan kebijakan pengelolaan batu bara dan gas yang tegas mengingat saat ini perusahaan tambang batu bara minta kenaikan harga batu bara ke PLN. Alasannya, harga batu bara di pasar dunia bertahan di atas US\$ 50 per ton, sedangkan harga jual di pasar domestik Rp 270.000 per ton.

Soal Kredibilitas

Keuntungan kedua dilanjutkannya ketiga proyek pembangkitan itu, menunjukkan kepercayaan investor asing. Ambil contoh PLTU Cilacap yang dibangun dengan sistem *joint venture* antara PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) anak perusahaan PT PLN dan perusahaan swasta China melalui perwakilan mereka di Indonesia, PT Sumber Energi Sakti Prima (SSP). Investasi senilai US\$ 510 juta antara lain berasal dari pinjaman Bank of China (US\$ 408 juta) dan sisanya US\$ 102 juta ditanggung bersama oleh PT SSP dan PT PJB.

Proyek infrastruktur kelistrikan akan berjalan mulus dan memberikan citra baik jika ada kepastian berusaha dan keamanan dari proyek patungan tersebut.

Jangan sampai dua kasus besar di sektor kelistrikan di tahun 2005 terulang. Pertama, kasus penolakan masyarakat Bali atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul. Kedua, tuntutan Pemerintah Kabupaten Gajahan sesuai target, yakni runtut atas bagi hasil yang lebih besar untuk PLTP Darajat.

Apabila kedua kasus itu tidak ditangani secara tepat, kepercayaan investor akan pudar lagi.

Selesai di sisi pembangkitan, masalah lain yang tak kalah pelik masih menghadang di bagian distribusi dan transmisi. Padamnya listrik di sebagian Jawa bagian barat selama lebih dari delapan jam pada 18 Agustus 2005, menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi di sistem transmisi.

Distribusi listrik dari pembangkitan ke konsumen di Pulau Jawa hanya mengandalkan satu sistem transmisi 500 kilovolt (KV) yang berada di jalur utara. Ini karena saudara kembar lainnya di selatan belum juga tersambung. Sistem 500 KV jalur selatan masih terputus di daerah Depok, Bantul, dan Klaten. Padahal, sistem itu ditargetkan bisa tersambung pada Agustus 2005.

Adanya sistem transmisi yang andal juga menjadi prasyarat untuk mengurangi kehilangan daya dalam pro-

10

es transmisi. Persentase kehilangan sebesar 11,4 persen mengindikasikan sistem tidak efisien.

Di luar sejumlah masalah besar tersebut, tidak boleh dilupakan upaya pembangkit listrik independen dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di daerah pedesaan yang tidak terjangkau aliran listrik PLN. Pembangkit listrik mikrohidro dan fotovoltaiik sebenarnya dari segi teknologi, terlalu mahal bagi masyarakat pedesaan.

Namun, dengan keterbatasan pembangunan infrastruktur, sistem pembangkitan ini menjadi alternatif yang tetap harus diteruskan dengan bantuan pendanaan dari pemerintah. Secara keseluruhan, tanpa pembenahan terhadap masalah-masalah di atas, sektor kelistrikan masih harus terengah mengejar pertumbuhan konsumsi listrik di tahun 2006. ■

Penulis adalah Pemerhati Sosial, tinggal di Yogyakarta

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 9

TAHUN 2006

“Sengatan” Listrik Bisa Bikin Inflasi Melonjak

DI tengah menguatnya rupiah yang cukup signifikan dalam meredam laju inflasi, belum bisa dijadikan jaminan. Apalagi dikaitkan dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan belum selesainya realisasi belanja 2005 di beberapa departemen.

Dikatakan Anggota Komisi XI dari F-PKS Rama Pratama, BI bakal kelimpungan dalam menjaga stabilitas moneter. Khususnya menyangkut inflasi yang ditakutkan tidak bisa terkendali. Dikata-

kan Rama, apabila TDL naik maka kalangan industri akan menaikkan harga produknya. Akibatnya, harga barang di pasaran melonjak naik. Sedangkan banyaknya departemen yang belum menghabiskan anggaran 2005, bakal menimbulkan masalah yang cukup serius.

“Departemen yang tidak dapat menyerap anggaran 2005 akan memajukan pada 2006. Akibatnya pada Januari sampai dengan April nanti akan ada anggaran belanja yang besar untuk Departemen,” jelasnya.

Menurut Ekonom Indef Imam Sugema, laju inflasi masih dalam batas normal. Adanya kenaikan gaji PNS sebesar 15 persen serta SLT II, justru membuat daya beli meningkat. Pada 2005, anggaran gaji PNS dipatok Rp 70 triliun. Dengan kenaikan 15 persen, jumlahnya mencapai Rp 10,5 triliun.

“Kucuran dana SLT bisa menimbulkan tekanan inflasinya sebesar 0,5 persen saja. Masih amanlah,”ukasnya. ■ WIS